

11 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Sukses raih Universal Health Coverage

Semarang (20/12/2022) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus membuktikan komitmennya untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya. Terbukti, per 01 Desember 2022, sebanyak 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau *Universal Health Coverage* (UHC) dengan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari 95% dari total jumlah penduduk. Akses layanan kesehatan kini semakin terbuka lebar bagi warga Jawa Tengah.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah sukses mencapai UHC. Hal ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat. Untuk itu, dukungan pemerintah daerah tetap dibutuhkan guna mempertahankan bahkan menambah cakupan kepesertaan JKN di kabupaten/kota lainnya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam agenda *Apresiasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program JKN dan Penyerahan Piagam Penghargaan UHC Award Tahun 2022*, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (20/12).

Ke-11 kabupaten/kota tersebut adalah Kota Magelang dengan capaian 99,74%. Kemudian, Kota Semarang 99,24%, Kabupaten Banjarnegara 97,09%, Kota Tegal 96,87%, Kota Surakarta 96,61% Kabupaten Brebes 95,94%, Kota Salatiga 95,84%, Kabupaten Rembang 95,63%, Kabupaten Klaten 95,60% dan Kabupaten Kudus 95,42%.

Ghufron menjelaskan, pihaknya selalu berupaya meningkatkan cakupan seluruh segmen kepesertaan melalui berbagai strategi, di antaranya peningkatan akses kanal pendaftaran berbasis digital secara menyeluruh baik bagi badan usaha, pemerintah daerah ataupun masyarakat informal. Sinergi lintas kementerian atau lembaga pun tidak kalah penting sehingga perlindungan jaminan kesehatan berjalan lebih optimal bagi masyarakat Indonesia.

“Peran dan dukungan pemerintah daerah dengan mendaftarkan penduduknya menjadi peserta JKN dapat mendorong peningkatan cakupan kepesertaan penduduk Indonesia mencapai UHC. Tak hanya itu, partisipasi masyarakat pun diharapkan melalui pendaftaran PBPU kolektif atau inovasi pendanaan masyarakat peduli JKN,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, UHC tidak hanya mengenai cakupan kepesertaan saja tetapi juga memastikan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial, baik dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang efektif. Bagi wilayah dengan capaian UHC, tentu ada *benefit* tersendiri bagi masyarakatnya. Peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang mencapai UHC akan langsung berstatus aktif tanpa harus melewati masa tunggu di akhir bulan (tanpa mekanisme *cut off*). Penduduk sudah dibekali kepastian penjaminan karena bisa didaftarkan sewaktu-waktu, baik dalam kondisi sehat maupun sedang sakit

“Kami juga sampaikan apresiasi kepada 24 kabupaten/kota di Jawa Tengah atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN di wilayah masing-masing,” ujar Ghufron.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Jawa Tengah antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menambahkan pihaknya akan memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan BPJS Kesehatan untuk peningkatan kualitas jaminan kesehatan. Menurutnya, optimalisasi cakupan kepesertaan JKN di Jawa Tengah tidak luput dari peran *stakeholder* melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bisa mendaftarkan seluruh masyarakat karena terbentur oleh beberapa aturan. Masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah harus tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT). Jika belum, maka pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan,” katanya.

Untuk itu, dia berharap adanya kolaborasi dan gotong royong semua pihak untuk mendukung kesinambungan Program JKN di Jawa Tengah. Salah satunya dengan CSR perusahaan yang dinilai mampu mendongkrak capaian UHC di kabupaten/kota.

“Masyarakat yang tidak bisa didaftarkan oleh pemerintah daerah maka bisa dibantu melalui CSR perusahaan. Program ini bagus karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan jaminan kesehatan,” ujarnya.

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik

BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta

PRESS RELEASE

11 Regencies/Cities in Central Java Successfully Achieved Universal Health Coverage

Semarang (20/12/2022) – The Provincial Government of Central Java continues to prove its commitment to providing certainty of health insurance for its citizens. It has been proven that as of December 1, 2022, as many as 11 regencies/cities in Central Java have succeeded in achieving universal health coverage or Universal Health Coverage (UHC) with more than 95% participation in the National Health Insurance Program (JKN) of the total population. Access to health services is now increasingly wide open for residents of Central Java.

"We express our highest gratitude and appreciation to the 11 districts/cities in Central Java that have successfully achieved UHC. This is a concrete manifestation of the government's presence in ensuring the availability of health insurance for the community. For this reason, local government support is needed to maintain and even increase the coverage of JKN membership in other districts/cities," said the President Director of BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti in the Appreciation Agenda for Local Government Support for the JKN Program and Submission of the 2022 UHC Award Certificate, at Gradhika Bhakti Praja Building, Tuesday (20/12).

The 11 regencies/cities are Magelang City with an achievement of 99.74%. Then, Semarang City 99.24%, Banjarnegara Regency 97.09%, Tegal City 96.87%, Surakarta City 96.61%, Purbalingga Regency 96.15%, Brebes Regency 95.94%, Salatiga City 95.84% , Rembang Regency 95.63%, Purbalingga Regency 96.15%, Klaten Regency 95.60% and Kudus Regency 95.42%.

Ghufron explained, his party is always trying to increase the coverage of all membership segments through various strategies, including increasing access to digital-based registration channels for business entities, regional governments, and the informal community. Synergy across ministries or agencies is also important so that health insurance protection runs more optimally for the people of Indonesia.

"The role and support of the local government by registering its population as JKN participants can increase the coverage of the participation of the Indonesian population to reach UHC. Not only that, but community participation is also expected through collective PBPU registration or innovative JKN-caring community funding," he said.

He revealed, UHC is not only about the scope of participation but also ensuring that everyone has access to comprehensive health services (promotive, preventive, curative, and rehabilitative) with quality without financial barriers. For areas with UHC achievements, of course, there are distinct benefits for the people. Participants registered by the local government who reach UHC will immediately become active without having to go through a waiting period at the end of the month (without a cut-off mechanism).

Residents could get the certainty of health insurance because they can be registered at any time, both when they're healthy and when they are sick

"We also express our appreciation to 24 districts/cities in Central Java for the local government's contribution in supporting the implementation of the JKN Program in their respective regions," said Ghufron.

During this activity, a Memorandum of Understanding was also signed on Optimizing the National Health Insurance Program in the Central Java Region between BPJS Kesehatan and the Provincial Government of Central Java.

The Deputy Governor of Central Java, Taj Yasin Maimoen added that his party would strengthen synergy and coordination with district/city governments in Central Java and BPJS Kesehatan to improve the quality of health insurance. According to him, optimizing the coverage of JKN participation in Central Java cannot be separated from the role of stakeholders through the Corporate Social Responsibility (CSR) Program.

"The Central Java Provincial Government cannot register all residents because they are hampered by several regulations. Communities registered by the local government must be recorded in the Unified Database (BDT). If not, then the regional government cannot do the budgeting," he said.

For this reason, he hopes that there will be collaboration and mutual assistance from all parties to support the continuity of the JKN program in Central Java. One of them is the company's CSR which is considered capable of boosting UHC achievements in districts/cities.

"People who cannot be registered by the local government can be assisted through the company's CSR. This program is good because people need health insurance," he said.